

BAB I

PENDAHULUAN

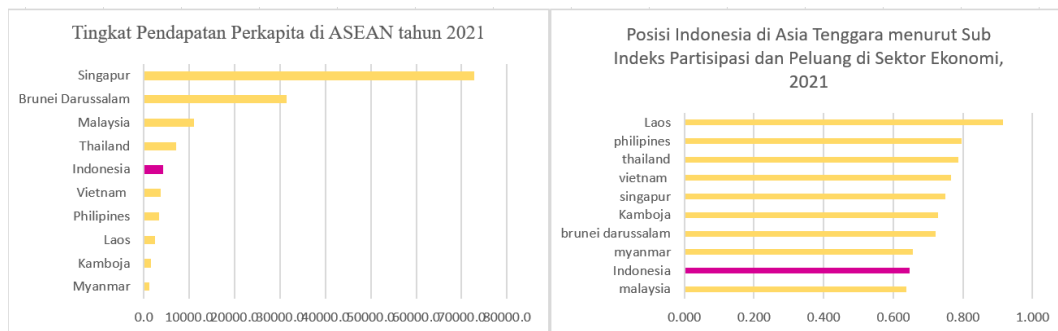
I.1 Latar Belakang

Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai ukuran untuk memperkirakan kemajuan suatu negara dalam membangun ekonominya. Dalam Teori *Human Capital* mengemukakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif adalah suatu bentuk modal atau aset yang sangat penting terhadap pembangunan ekonomi (Becker, 1993). Tingkat pendapatan perkapita dapat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia (Todaro & Smith, 2014). Hal ini berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan kemampuan seseorang dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, begitupun dengan pemberdayaan perempuan dalam pendidikan dan peluang kerja yang dapat mengoptimalkan potensi manusia tanpa memandang jenis kelamin, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara (Klasen & Lamanna, 2009).

Pada teori *Human Capability* menekankan kemampuan manusia merupakan hal yang penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia yang unggul akan meningkatkan pemberdayaan sehingga produktivitas menjadi lebih efektif, maka penting memberikan kesempatan dan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan kemampuan mereka (Sen, 1999), tetapi dalam hal ini kerap kali proporsi perempuan dan laki-laki berbeda yakni tidak seimbang. Menurut Kabeer (2001) pemberdayaan perempuan adalah konsep yang mencakup serangkaian strategi dan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yakni segi ekonomi, politik, dan sosial. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa pemberdayaan perempuan akan membawa manfaat bagi individu perempuan itu sendiri, masyarakat, dan negara secara keseluruhan.

Pemberdayaan perempuan berdampak positif pada pendapatan per kapita, yang mencakup kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara adil dalam akses ke sumber daya produktif, pekerjaan yang layak, dan partisipasi yang berarti dalam pengambilan keputusan ekonomi (Wei, et al., 2021). Saat ini, wanita adalah

kekuatan ekonomi yang semakin penting di pasar global. Freeland (2012) menjelaskan bahwa perempuan memiliki pengaruh penting dalam keputusan pembelian dan investasi serta peran yang semakin penting dalam pasar tenaga kerja.



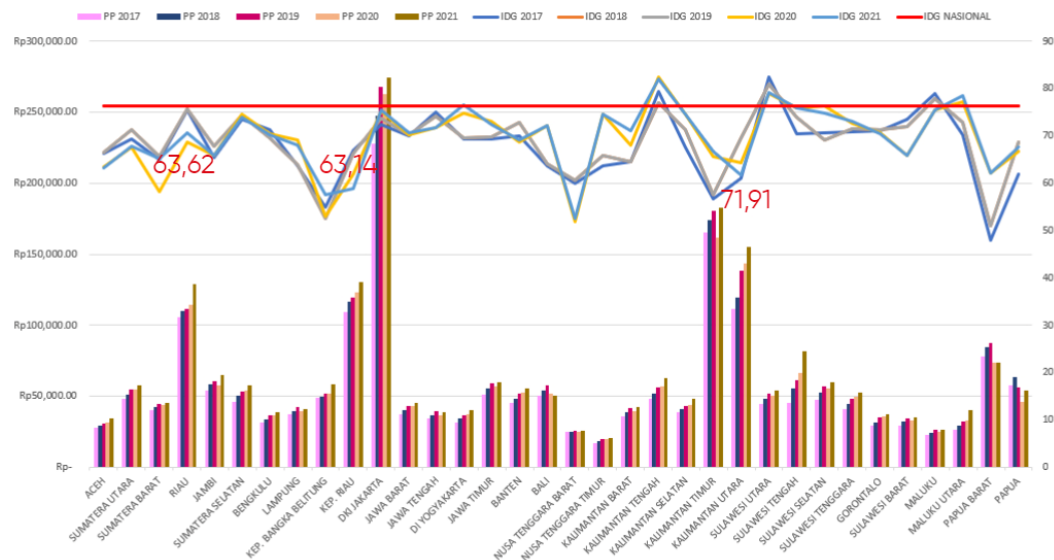
Sumber : (KEMENPPPA, 2022) (World Bank, 2022) di akses melalui website worldbank.org dan kemenpppa.go.id

Grafik 1. Tingkat Pendapatan Perkapita Negara di ASEAN Tahun 2021 (Rupiah) dan Posisi Indonesia di Asia Tenggara menurut Sub Indeks Partisipasi dan Peluang di Sektor Ekonomi Tahun 2021 (Persen)

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN dengan tingkat kemajuan yang pesat dalam pemulihan ekonomi. Menduduki posisi ke 5 dengan tingkat pendapatan perkapita tertinggi di ASEAN, Indonesia berhasil mengungguli Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja dan Myanmar. Adapun dengan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi yang unggul dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi yang seharusnya dapat memberikan sumber daya dan peluang bagi pemberdayaan terkhusus pada perempuan. Pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya terwujud dengan sempurna di Indonesia, terbukti pada sub indeks partisipasi dan peluang di sektor ekonomi yang menggambarkan kesenjangan partisipasi dan peluang perempuan di sektor ekonomi. Indonesia hanya memiliki nilai sebesar 0.647, sedangkan angka tersebut jauh dari Laos yakni 0,915. Negara Laos, Vietnam, dan Kamboja menduduki peringkat lebih tinggi, meskipun jika dilihat pada pertumbuhan pendapatan perkapita di ASEAN, pendapatan perkapita di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara dengan sub indeks partisipasi dan peluang di sektor ekonomi yang tinggi (KEMENPPPA, 2022).

Fenomena ini menjadi suatu permasalahan karena perbaikan ekonomi seharusnya mampu membangkitkan pengaruh dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Adapun beberapa faktor yang terkait dengan pemberdayaan perempuan

diantaranya yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) dan Upah Perempuan.



Sumber : (BPS , 2023) di akses melalui website bps.go.id

Grafik 2. Indeks Pemberdayaan Gender (Persen) dan Pendapatan Perkapita Indonesia (Rupiah) tahun 2017-2021

Indeks Pemberdayaan Gender ini menggambarkan peran dan kontribusi perempuan dalam perekonomian dan politik di wilayah tersebut, Pemberdayaan gender memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan perempuan. Semakin baik pengaruh gender di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula pendapatan perempuan dalam rata-rata pendapatan keluarga di wilayah tersebut (Adnan & Amri, 2020). Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2017-2021 cenderung meningkat dan tetap stabil, meski melambat di beberapa provinsi. Semakin menyentuh angka 100 maka tingkat pemberdayaan perempuannya semakin tinggi. Menurut data BPS tahun 2021 Skor IDG secara nasional yakni 76,26% namun provinsi dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan meningkat seperti Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau, ternyata belum mencapai skor IDG yang tinggi yaitu dengan nilai rata-rata hanya 71.91%, 63.14% dan 63.62% dan justru menurun selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan perempuan sering kali dianggap hanya cocok untuk pekerjaan yang berkaitan dengan tugas rumah tangga, sedangkan laki-laki dipandang lebih cocok untuk pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam kehidupan

Meivianti Putri Atinna, 2023

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DI INDONESIA

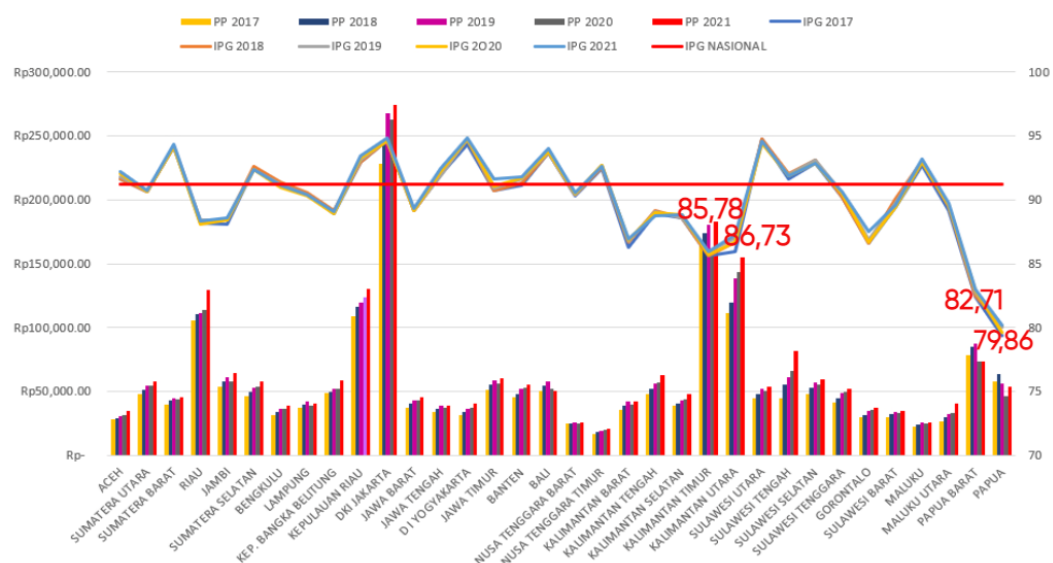
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi & Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan
 [www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

politik dan bisnis (Sihotang, A., & Wahyudi, A, 2018) dan juga kurangnya dukungan pemerintah terhadap kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam bisnis dan politik, seperti di Provinsi Kepulauan Riau, implementasi program anggaran responsif gender kurang optimal karena tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja (Harun, 2017). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita tidak serta merta meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender di wilayah ini.

Adapun provinsi-provinsi yang memiliki tingkat IDG yang tinggi hal ini berkaitan dengan keterlibatan potensi perempuan terhadap IDG seperti di pulau Papua, perempuan Papua terlibat dalam perjuangan, khususnya para pedagang kecil, untuk mendapatkan haknya berjualan dengan layak. Pada saat yang sama, perempuan Papua juga turut serta dalam memperjuangkan hak politiknya. Pasalnya, ada pula perolehan suara dan jumlah kursi perempuan tidak berbanding lurus dengan perkembangan kualitas partisipasinya. Tak kalah pentingnya adalah dukungan para suami yang berpendidikan sama, agar mereka memahami posisi perempuan yang harus melakukan lebih dari sekedar pekerjaan rumah tangga. Jika laki-laki tidak mengerti secara terbuka, sulit juga bagi perempuan yang sudah menikah, yang sering disalahkan atas runtuhnya rumah tangga karena konflik kepentingan di dalam dan di luar rumah (Widjojo, 2017). Di Pulau Sulawesi, perempuan Bugis khususnya memiliki tradisi kepemimpinan yang kuat dan berperan penting dalam pengambilan keputusan masyarakat (Muzakki, A, 2016) dan perempuan di Pulau Maluku juga terlibat dalam politik. Partisipasi Mereka terlibat dalam berbagai organisasi politik dan komunitas lokal yang berfokus pada isu-isu perempuan untuk perempuan (Puspasari, E, 2018). Pada saat yang sama, perempuan di pulau Nusa Tenggara dan Bali juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal, menjadi pengusaha, petani, dan nelayan. Seorang petani di Bali, berhasil bercocok tanam dan menciptakan lapangan kerja bagi para wanita di desanya melalui program pertanian organik berkelanjutan.

Proporsi perempuan dalam pendapatan yang terus meningkat dapat diamati tidak hanya dari Indeks Pemberdayaan Gender, tetapi juga dari beberapa aspek lainnya. Perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia, harus memperoleh kesehatan, kecerdasan, dan pendidikan dengan sebaik-baiknya, sehingga isu

pemberdayaan perempuan harus diintegrasikan ke dalam proses pembangunan. Terdapat korelasi yang kuat antara IPG dan pendapatan per kapita, secara umum negara dengan IPG yang lebih tinggi juga memiliki pendapatan per kapita yang tinggi (UNDP , 2020) yakni dengan mengoptimalkan akses perempuan pada kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak dapat meningkatkan kualifikasi dan produktivitas tenaga kerja pada perempuan sehingga mendapatkan pekerjaan dan upah yang lebih baik.



Sumber : (BPS, 2023) di akses melalui website bps.go.id

Grafik 3. Indeks Pembangunan Gender Indonesia (Persen) dan Pendapatan Perkapita (Rupiah) menurut Provinsi tahun 2017-2021

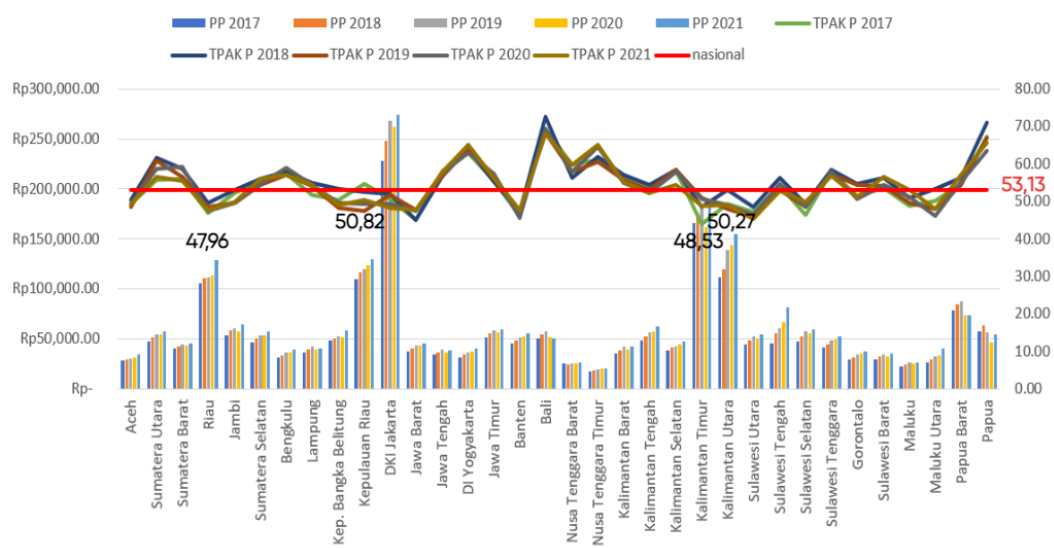
Sama halnya dengan IDG bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) semakin menyentuh angka 100 maka tingkat pembangunan perempuannya semakin tinggi, masih adanya perbedaan yang cukup besar antar provinsi di Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia. Menurut data BPS tahun 2021 IPG Indonesia secara nasional memiliki skor sebesar 91,27%. Gambar 3 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita yang tinggi dan meningkat pada tahun 2017-2021 terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua yang ternyata justru memiliki skor IPG terendah dan mengalami penurunan yaitu hanya dengan rata-rata sebesar 85.78%, 86.73%, 82,71%, dan 79,86%. Hal ini dikarenakan perempuan di Pulau Kalimantan yang pendapatannya per kapitanya meningkat justru mereka terus menghadapi diskriminasi dan kekerasan yang berpengaruh negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, serta ketidaksetaraan

pedesaan dan perkotaan dalam akses pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki (UNDP, 2018). Adapun di Pulau Papua, Perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam pendidikan, seperti kesulitan mengakses sekolah, kurangnya guru perempuan, serta tekanan budaya untuk menikah dan berkeluarga. Adapun di Papua Tingkat kematian ibu dan anak masih tinggi, terutama di daerah pedalaman serta akses mereka terhadap sumber daya seperti lahan, modal, dan teknologi masih sangat terbatas, sehingga perempuan juga sering mengalami diskriminasi dalam hal upah dan perlindungan kerja (Ruru & Tjandra, 2019).

Berbeda dengan Provinsi lainnya yang sebagian besar memang memiliki skor IPG tinggi yakni 87-94%, hal ini dikarenakan kontribusi perempuan di berbagai provinsi seperti perempuan di pulau Sumatera dan Jawa yang dapat mendorong siswa perempuan untuk belajar, membantu dalam proses belajar mengajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Perempuan di pulau Jawa menjadi pionir dalam menghilangkan ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan. Mereka secara aktif berpartisipasi dalam mendirikan sekolah dan memperluas akses pendidikan yangimbang terhadap anak laki-laki dan perempuan (Prmono, A. B., & Cahyono, E. D, 2019). Adapun Perempuan Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara dan Bali telah berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan anak-anak, terutama perempuan dengan menjadi guru, pengajar, dan pemimpin sekolah dan juga perempuan di Pulau Maluku yang berkontribusi pada meningkatkan kesehatan perempuan melalui berbagai inisiatif kesehatan dengan membentuk kelompok kesehatan ibu dan anak di berbagai desa untuk memberikan edukasi kesehatan pada ibu hamil dan anak-anak. Berdasarkan penjelasan tersebut, menggambarkan bahwa meskipun masih adanya ketidaksetaraan di wilayah tertentu, akan tetapi peran perempuan pun sangatlah besar dalam pembangunan gender

Faktor lainnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, dimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat besar. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan ukuran partisipasi penduduk dalam perekonomian (KEMENPPPA, 2022). Pergerakan TPAK di daerah juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah dan keseimbangan gender antara laki-laki dan

perempuan. Semakin baik rasio jenis kelamin maka semakin tinggi TPAK yang dicapai oleh perempuan dan sebaliknya.



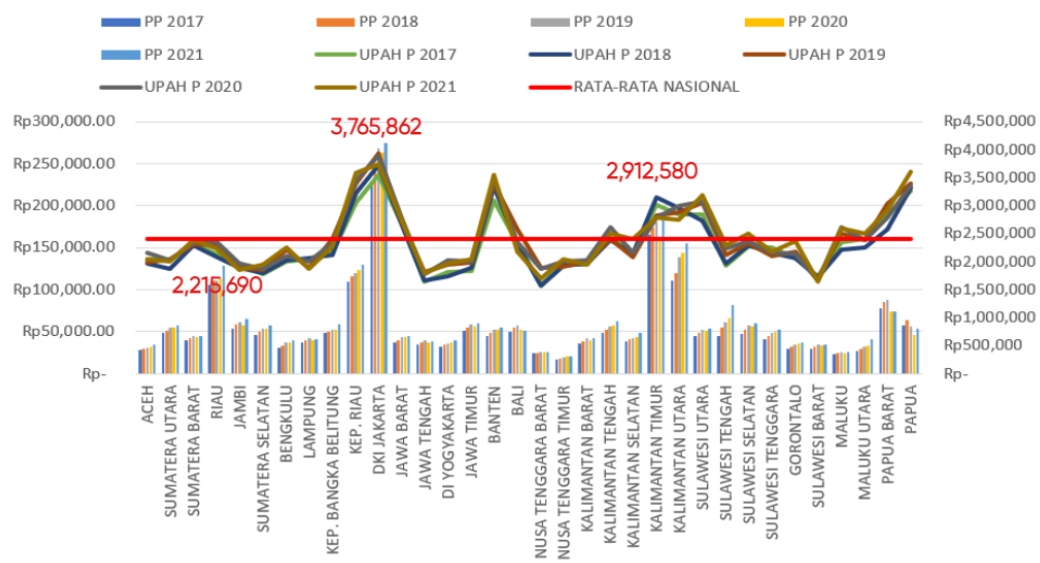
Sumber : (BPS, 2022) diakses melalui website bps.go.id

Grafik 4. TPAK Perempuan dan Pendapatan Perkapita tahun 2017-2021 (Persen dan Rupiah)

Secara nasional, menurut data BPS tahun 2021 TPAK perempuan sebesar 53,13%, jauh lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki, yaitu 82,41%. Hal ini menunjukkan bahwa TPAK Perempuan jauh lebih rendah daripada Laki-laki, padahal berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam angkatan kerja sebanding dengan laki-laki, yaitu 50,01% dari total penduduk usia kerja. Grafik 4. Menunjukkan pada tahun 2017-2021, 17 provinsi memiliki proporsi TPAK perempuan di bawah nasional termasuk provinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan meningkat seperti Kalimantan Timur dan Utara, Kepulauan Riau, dan Riau yang justru menurun pada tahun 2018-2021 yakni hanya dengan rata-rata 48.53%, 50.27%, 50.82% dan 47.96%, hal ini dikarenakan banyak perempuan yang mempunyai dua peran yakni mengurus rumah tangga dan keluarga serta bekerja di luar rumah. Beban kerja ganda ini seringkali membuat perempuan tidak dapat menerima pekerjaan yang membutuhkan jam kerja lebih lama atau pekerjaan yang membutuhkan banyak mobilitas tinggi (BPS, 2020). Seperti halnya perempuan Papua cenderung lebih banyak terlibat dalam pekerjaan informal daripada pekerjaan formal dan di Papua tingkat pekerjaan perempuan masih di bawah rata-rata nasional (Istiani & Salahuddin, 2020).

Berbeda dengan Provinsi Bali memiliki skor TPAK perempuan tertinggi yaitu 69,46. Perekonomian Provinsi Bali didominasi oleh sektor pariwisata yang mampu menyongkong partisipasi angkatan kerja perempuan di atas rata-rata nasional, khususnya di sektor usaha yang menyediakan akomodasi dan makanan serta minuman, begitupun juga para wanita di pulau Nusa Tenggara yang berfokus pada industri pariwisata. Di Pulau Sulawesi banyak perempuan yang terjun dalam industri perikanan, penangkapan ikan dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan mengurangi kemiskinan (Taruna & Murniati, 2019), begitupun dengan Perempuan di Pulau Maluku diberikan kesempatan untuk belajar keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja seperti pengolahan makanan, menjahit, dan menjalankan bisnis melalui program-program pelatihan (Lestari, D, 2018). Hal ini serupa dengan data BPS yang mencatat tahun 2021 perempuan terlibat dalam sektor formal hanya sebesar 36,20% dan sektor informal sebesar 63,80%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia memiliki lebih banyak pekerjaan di sektor informal daripada di sektor formal, yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita tidak serta merta meningkatkan TPAK perempuan. Perlu ditekankan bahwa meskipun TPAK Perempuan masih memiliki gap yang tinggi, dari tahun 2017-2021 TPAK Perempuan terus meningkat dari 50,89% menjadi 53,70%, bahkan di tahun 2020-2021 TPAK laki-laki justru menurun menjadi 82,27 hal ini mengindikasikan adanya peningkatan keterlibatan perempuan pada aspek ekonomi dalam situasi pandemi dikarenakan menurunnya pendapatan keluarga yang membuat perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan juga banyaknya kesempatan kerja pada pelayanan jasa perawatan kesehatan yang lebih banyak diakses perempuan. Hal ini memberikan catatan penting bahwa keterlibatan perempuan harus diperhitungkan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu daerah.

Semakin tinggi pendidikan dan TPAK seorang perempuan, maka akan semakin tinggi gajinya (Djuhara, Suharnomo, & Widyanti, 2016). Upah minimum yang lebih tinggi untuk pekerja perempuan dapat mengurangi ketimpangan upah dan kemiskinan, yang berdampak positif pada pendapatan per kapita (Amanah, F, 2018).



Sumber : (BPS, 2022) di akses melalui website bps.go.id

Grafik 5. Upah Perempuan dan Pendapatan Perkapita menurut Provinsi pada tahun 2017-2021 (Rupiah)

Menurut ILO dan UN Women (2020) perempuan mempunyai pendapatan 23% lebih kecil dibandingkan laki-laki. Bahkan, meskipun mempunyai kapasitas yang sama, perempuan dibayar 20-30% lebih kecil (Bappenas, 2021). Hal ini membuktikan bahwa masih adanya kesenjangan upah yang di alami oleh perempuan, dapat dilihat pada grafik 5. Menunjukkan sebagian provinsi memiliki upah perempuan di bawah rata-rata nasional dan menurun pada tahun 2018-2020 yakni dibawah 2,4jt (BPS, 2022), padahal memiliki pendapatan perkapita yang tinggi dan meningkat seperti halnya terjadi di Provinsi Riau bahkan seluruh bagian Provinsi di Pulau Sumatera kecuali Kep.Riau memiliki upah dibawah rata-rata nasional, ini karena alasan klise seperti pekerjaan perempuan yang dilakukan di sektor informal atau di sektor rumah tangga, yang umumnya dibayar lebih rendah. Sektor industri di pulau Sumatera umumnya didominasi oleh perusahaan tekstil dan banyak perempuan yang bekerja di sektor ini sebagai buruh pabrik, akibatnya upah perempuan cenderung lebih rendah, seperti perempuan di Riau memperoleh upah lebih rendah karena faktor seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, jenis pekerjaan dan sektor pekerjaan (Islamuddin & Yusuf, 2019), sedangkan DKI Jakarta dan Kalimantan Timur memiliki tingkat upah perempuan yang tinggi, hal ini dikarenakan perempuan di Jakarta dan Kalimantan cenderung bekerja di sektor yang lebih berkualitas dan padat modal, seperti sektor manufaktur dan jasa.

Pekerjaan di sektor-sektor ini cenderung memberikan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor informal (Doytch & Sharaf, 2019).

Kontribusi perempuan dari daerah ke daerah cukup bervariasi, yaitu perempuan di pulau Sulawesi telah terlibat dalam meningkatkan upah perempuan baik di sektor informal maupun formal, sektor formal mencakup bisnis dan jasa, namun masih menghadapi hambatan seperti diskriminasi gender, dan akses yang terbatas terhadap peluang dan sumber daya serta kebijakan yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan di sektor formal (Alfarabi & Indarti, 2016). Adapun gaji rata-rata perempuan di Papua hanya 69,5% dari laki-laki, dan faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman kerja dan pekerjaan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan kesenjangan upah gender (Herlina, Lukman, & Mukhlis, 2018), Begitu pula dengan perempuan Maluku yang telah memberikan kontribusi besar dalam sektor pertanian, khususnya di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Upah perempuan di sektor tersebut umumnya rendah, tetapi penghasilan dari pertanian tetap menjadi sumber penghasilan utama banyak keluarga di Maluku (Haryani, N, 2019), banyak perempuan di pulau Nusa Tenggara dan Bali bekerja sebagai pekerja rumah tangga, di industri pariwisata dan di pertanian, namun seringkali menerima upah rendah dan kurang jaminan sosial, seperti di Taman Nasional Komodo, dalam industri pariwisata perempuan hanya menjadi pedagang kecil dan terbatas dalam pengelolaan pariwisata (Ahmad & Yunita, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, masih adanya kesenjangan upah pada peran perempuan di sektor pekerjaan.

Urgensi dalam pemberdayaan perempuan dijadikan sebagai analisis kontribusi perempuan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas (Yuslin, 2021). Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengubah dan memperkuat distribusi peluang, sumber daya dan pilihan bagi laki-laki dan perempuan sehingga mereka memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk kehidupan mereka sendiri dan berkontribusi pada keluarga, komunitas, bahkan negaranya. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi melambat tentunya akan berdampak negative pada pendapatan baik level nasional, regional, maupun level perkapita.

Beberapa penelitian telah dilakukan dahulu (Sari, 2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan gender yang merupakan salah satu variabel

gender inequality tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan per kapita. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (NOVTAVIANA, 2020) yang menyatakan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun penelitian ini dibatasi pada pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai pendapatan per kapita, padahal pemerintah menggunakan pendapatan per kapita sebagai ukuran utama kesejahteraan ekonomi penduduk (Arsyad, 2010). Berdasarkan uraian tersebut sehingga menjadi latar belakang penelitian ini yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Pemberdayaan Perempuan terhadap Pendapatan Perkapita di Indonesia”.

I.2 Perumusan Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang pendapatan per kapitanya terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya manusia dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara merata terhadap perempuan. Memberikan perhatian khusus untuk memperkuat pengaruh perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik dan profesional. Hal ini karena pemberdayaan perempuan di Indonesia masih sangatlah minim di sebagian besar provinsi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks yang menggambarkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, sehingga peningkatan IDG seharusnya dapat meningkatkan produktivitas perempuan dalam bisnis dan politik, tetapi masih muncul di beberapa provinsi dan tahun tertentu tidak menunjukkan peningkatan nilai IDG bersamaan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Sama halnya terjadi pada Indeks Pembangunan Gender (IPG), diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Faktor upah perempuan juga dapat mempengaruhi pendapatan per kapita, dalam hal ini menunjukkan adanya penyempitan kesenjangan upah gender, bahkan hampir seluruh Provinsi dalam keadaan upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Adapun peningkatan faktor TPAK perempuan, yang menunjukkan proporsi perempuan dalam angkatan kerja formal, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita perempuan, namun beberapa Provinsi memiliki tingkat TPAK Perempuan yang

rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dimunculkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender pada Pendapatan perkapita di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Pendapatan di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh Upah Perempuan terhadap Pendapatan Perkapita di Indonesia ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aspek pemberdayaan perempuan terhadap pendapatan perkapita di Indonesia. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender pada Pendapatan perkapita di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Pendapatan di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Perempuan terhadap Pendapatan Perkapita Provinsi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Perempuan terhadap Pendapatan Perkapita di Indonesia

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil pada penelitian atau riset ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan sistem yang mendukung peran perempuan dalam perekonomian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu ekonomi pada pentingnya peran perempuan yakni diharapkan dapat membuat inovasi baru dalam peningkatan kemampuan perempuan sehingga dapat terlibat dalam kegiatan yang produktif
- c. Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan dan kontribusi perempuan dalam perekonomian yang dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dijadikan sebagai indikasi saran serta masukan bagi pemerintah dalam pemecutan dan pembuatan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan per kapita di Indonesia.

b. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memiliki manfaat dijadikan sebagai indikasi saran serta masukan sehingga dapat membuka wawasan serta ide bagi peneliti lain, terutama dalam menyempurnakan teori pada aspek pemberdayaan perempuan terhadap pendapatan per kapita di Indonesia.

c. Untuk peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran untuk kepentingan penulisan ilmiah, serta memperkaya khazanah dan pengetahuan tentang variabel yang diteliti.